

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas nilai-nilai lokal apa saja yang ada di masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang dalam mengantisipasi *Money Politics*. Dengan menggunakan teori modal sosial, Bourdieu menjelaskan bahwa kumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terhubung untuk memiliki jaringan yang tahan lama lebih atau kurang hubungan kelembagaan dari kenalan dan pengakuan timbal balik atau dengan kata lain, untuk keanggotaan dalam suatu kelompok yang menyediakan masing-masing anggotanya dengan dukungan dari modal yang dimiliki kolektivitas, “kredensial” yang memberikan hak kepada mereka untuk dipuji, dalam berbagai arti kata.¹

Bourdieu menyatakan ada tiga macam modal yaitu modal uang, modal sosial, dan modal budaya, dan akan lebih efektif digunakan jika antara ketiganya ada interaksi sosial dan hubungan sosial.² Dari ketiga modal menurut Bourdieu diatas, modal budaya dan modal sosial yang paling berkaitan dalam mengaktualisasikan kemasyarakatan tentang nilai-nilai lokal atau budaya-budaya lokal masyarakat dalam mengantisipasi *money politics*. Oleh karena itu nilai lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harga dan martabat manusia dalam komunitasnya, serta nilai lokal atau budaya lokal dengan sendirinya bersifat sosial dan cultural. Dalam hal ini peneliti akan membahas hasil penelitian dengan menggunakan teori modal sosial dari Pierre Bourdieu.

¹ Julia Hauberer. (2010). *Social Capital Theory*, Prague: Dissertation Charles University, h.38

A. Nilai Lokal Masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang Dalam Mengantisipasi *Money Politics*

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan Aspahani mengatakan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) termasuk daerah yang jual beli suara atau melakukan *Money Politics*,³ dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga melakukan investigasi *Money Politics* yang dilakukan caleg DPR RI dengan melibatkan pihak Gakkumdu bahwa mereka mendapatkan dua buah video yang di *upload* ke media sosial.⁴ Dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuklah di Desa Kuro dan Desa Pulau Layang.

Desa Kuro dan Desa Pulau Layang ini memiliki tradisi belulus yang dipegang teguh oleh masyarakat, tradisi inilah merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat supaya dalam pemilihan itu damai tidak terjadi kecurangan dan diberi kelancaran. Serta masyarakat juga sifat solidaritasnya sangat kuat karena masyarakat juga berpegang teguh pada motto *bende seguguk* yang menggambarkan agar kehidupan masyarakat dan kepemimpinan daerah dengan semangat kesatuan serta dapat menciptakan atau mewujudkan dalam pemilihan itu harus bersifat damai, jujur, transparan, adil sehingga akan mendapatkan akhir yang bahagia.

³ M. Merdeka. Com. Diakses tanggal 19 November 2019.

⁴ <https://sumselupdate.com> Diakses tanggal 19 November 2019.

Dimasa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam sebelum tahun 1822 M, Pemerintah marga ini digunakan oleh pemerintah Kesultanan Palembang Darussalam untuk mendekati dan menguasai masing-masing kelompok marga, terutama diwilayah-wilayah aliran sungai yang mudah didatangi oleh perahu-perahu atau sampan-sampan yang dinamakan “Pencalang”.⁵

Pada tahun 1979 dengan diundangkannya UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintah Desa, merupakan proses awal dari penghampusan terhadap Pemerintahan Marga dan mengantikannya dengan Pemerintahan Desa serta pemberhentian Kepala-Kepala marga (Pasirah).⁶

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang serta tokoh adatnya. Nilai lokal merupakan nilai-nilai budaya yang bersifat bijaksana yang ada di dalam suatu masyarakat yang sudah diajarkan secara turun menurun oleh orang tua kita kepada anak-anaknya. Sehingga nilai lokal akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

⁵ Wijaya Kusuma. (2004). *Nasib Pemerintahan Marga di Sum-Sel di Bawah Bayang-bayang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press, h. 14

⁶ *Ibid.*, 16

1. Nilai Lokal Masyarakat Desa Kuro Dalam Mengantisipasi *Money Politics*

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Kuro, Menurut Habib Rosyidin 55 tahun menjabat sebagai kades, informan berpendapat bahwa:

“Dalam Pilkada ini antusias masyarakat saat masa kampanye sangat ramai dan kampanyenya ada yang datang kerumah serta pada saat datang dari rumah kerumah itu calon kandidat memberikan sesuatu berupa uang, jilbab, sebenarnya sih dosa melakukan money politics dalam undang-undang sudah dijelaskan bisa kena sanksi dan bisa masuk penjara, berbeda dengan saat zaman marga dahulu tidak ada yang namanya money politics masyarakat memilih dengan tulus dan memilih calon berdasarkan yang mereka kenal.”⁷

Berdasarkan dari penjelasan dari masyarakat Desa Kuro ia berapat bahwa dalam pemilihan zaman marga pada tahun 1929-1978 tidak ada *Money Politics* serta masyarakat memilih dengan tulus dan memilih calon kandidat berdasarkan yang dikenal sampai dengan tahun 2012 dan berbeda dengan pilkada sekarang masyarakat sangat antusias berpartisipasi dalam pilkada ini serta pada saat kampanye sangat ramai, serta masih terjadi *Money Politics* pada saat pilkada dan masyarakat mengakui kalau melakukan *Money Politics* itu dosa dan dilarang oleh agama, dalam undang-undang pun sudah dijelaskan larangan-larangan melakukan *Money Politics* bisa mendapatkan sanksi dan bisa masuk penjara.

⁷ Syamsudin, Masyarakat Desa Kuro, Wawancara tanggal 23 September 2019.

Kemudian informan yang kedua yaitu sebagai tim sukses salah satu calon kandidat, Menurut Rusdi 50 tahun, ia beranggapan bahwa:

“Pada saat masa kampanye memang sangat ramai dan sebelum hari pemilihan kita kasih dana sama calon untuk dibagi-bagikan masyarakat yang berkopetensi untuk mendukung calon kandidat dan masyarakat yang sudah terdaftar seperti teman-teman keluarga dan anggota saya yang merupakan orang yang siap mendukung. Waktu hari pemilihan saya memang sengaja datang kebeberapa TPS untuk pantau apa orang yang saya kasih dana apa memang dia benar-bener datang ke TPS dan memang bisa dibilang semua yang saya kasih uang datang ke TPS tapi saya tidak tau siapa yang mereka pilih, berbeda dengan zaman dahulu tidak ada Money Politics cara pemilihannya pun berbeda dengan zaman sekarang ada pada zaman masyarakat memilih dengan membisikan ke panitia siapa yang mereka pilih, dan masyarakat memilih pun dari hati mereka tanpa ada iming-iming uang.”⁸

Berdasarkan penjelasan dari salah satu tim sukses salah satu calon kandidat ia berpendapat bahwa pada zaman marga pada tahun 1928-1978 tidak ada yang namanya *Money Politics*, cara pemilihan pada zaman marga pun sangat unik dengan membisikan ke panitia calon kandidat yang mana yang akan mereka pilih, pada zaman itu nilai lokal masyarakat masih sangat kental dengan tidak adanya *Money Politics*, sampai dengan tahun 2012 masyarakat memilih calon kandidat dari hati mereka.

Berbeda dengan zaman sekarang pada saat sebelum hari pemilihan para tim sukses dikasih dana oleh calon kandidat untuk dibagi-bagikan kemasyarakat yang berkopetensi untuk memilih calon kandidat yang siap

⁸ Rusdi, Masyarakat Desa Kuro, Wawancara tanggal 23 September 2019.

mendukung. Serta para tim suksesnya mengontrol disetiap TPS untuk melihat apa orang-orang yang dikasih uang itu memang datang ke TPS .

Kemudian yang ketiga ada tanggapan dari Ipung 45 tahun sebagai masyarakat yang menerima pemberian uang dari calon kandidat yang juga memahami sistem pemilihan pada zaman marga, ia beranggapan bahwa:

“saat kampanye kemarin masyarakat cukup antusias saya pernah melihat ada yang kampanye di acara-acara syukuran pada saat kampanye ada yang memberikan kami uang atau barang kan tidak baik untuk ditolak karena nanti ia tersingung apalagi orang yang kita kenal, jadi jika kita sudah ambil itu uang yang dikasih calon kandidat atau tim sukses supaya pilih dia pasti nanti jika hari pencoblosan pasti dia mencari-cari kita kita di TPS untuk memastikan apa kita datang atau tidak, kalau kita tidak datang jadinya tidak enak sama yang sudah kasih uang karena nanti dia menyangka dan beranggapan kita tidak bisa dipercaya dan hanya makan gaji buta, iya kalau dibandingkan zaman dahulu sangat berbeda yang dimana jauh dari kata kecurangan-kecurangan masyarakat dahulu sangat berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang sudah dibuat oleh para nenek moyang didesa ini.”⁹

Dari penjelasan masyarakat di atas bahwa pemilihan zaman sekarang saat kampanye masyarakat cukup antusias dan calon kandidat melakukan kampanye di acara-acara syukuran pada saat kampanye calon kandidat memberikan uang dan barang dan masyarakat merasa tidak enak jika pemberian itu ditolak karena nanti orang yang memberikan itu tersingung, serta jika sudah menerima uang dari calon kandidat pada saat hari pemilihan tim sukses memastikan bahwa orang yang mereka kasih uang atau barang tersebut benar-benar memilih.

⁹ Ipung, Masyarakat Desa Kuro, Wawancara tanggal 23 September 2019

Berbeda dengan pada saat pemilihan zaman marga pada tahun 1928-1978 dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang yang dimana pada zaman marga jauh dari kata kecurangan serta masyarakat pada saat itu juga sangat berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang sudah dibuat oleh para nenek moyang dahulu yang ada didesa ini, hingga sampai dengan tahun 2012 masyarakat sangat takut melakukan sebuah kecurangan pada saat pemilihan.

Keempat tanggapan dari Oton 65 tahun sebagai tokoh adat, ia beranggapan bahwa:

“kemarin pada saat kampanye saya merasa tidak ada yang calon kandidat yang benar-benar berkampanye cuma ada tim suksesnya yang datang kerumah untuk memeberikan uang, nanti kalau pada saat pemilihan kami datang ke TPS untuk memilih supaya orang yang pernah kasih saya uang bisa melihat bahwa saya datang untuk memilih sehingga sehingga ketika pemilihan saya bisa dapat uang lagi dari mereka, pemilihan zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang yang dimana zaman dahulu masyarakat memilih dengan tulus tidak ada yang seperti sekarang.”¹⁰

Dari penjelasan masyarakat diatas bahwa pada pemilihan zaman sekarang menurutnya berbeda dengan zaman marga, menurutnya pemilihan sekarang tidak ada calon kandidat yang berkampanye tetapi ada tim sukses dari salah satu calon kandidat datang dari rumah kerumah untuk memberikan uang, dan segala orang yang memberikannya uang diterimanya. Berbeda dengan pemilihan zaman marga pada tahun 1928-

¹⁰ Oton, Masyarakat Desa Kuro, Wawancara tanggal 23 September 2019

1978 dahulu masyarakat memilih dengan tulus sampai dengan tahun 2012 kecurangan tidak pernah terjadi pada saat pemilihan.

Kemudian kelima penjelasan dari salah satu tokoh adat, Menurut

H. Ibrahim 60 tahun, ia beranggap bahwa:

“pada saat kampanye didesa ini saat sebelum pemilihan pasti banyak calon kandidat yang meberikan uang atau barang untuk sekarang saya melihat politik uang ini sudah sangat lumrah dikalangan masyarakat serta untuk larangan-larangan dalam mengantisipasi money politics pasti sudah diterapkan oleh undang-undang dan Bawaslu untuk didesa ini pasti disaat pemilihan ada Panwaslunya untuk melihat apakah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan calon kandidat pada saat pemilihan, pemilihan zaman dahulu tentu sangat berbeda dengan zaman sekarang.”¹¹

Dari penjelasan diatas bahwa pada saat pemilihan zaman marga tahun 1928-1978 calon kandidat sangat bersifat transparan sehingga tidak terjadi *Money Politics* dan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Berbeda dengan zaman sekarang saat kampanye di desa ini sering terjadinya *Money Politics* yang dilakukan oleh calon kandidat yang inigin memenangkan dirinya, serta masyarakat sudah menyadari bahwasanya jika melakukan *Money Politics* akan dikenakan hukuman dan pemilihan di zaman sekarang sangat berbeda dari zaman marga dahulu yang dimana zaman dahulu masyarakat memilih dengan tulus tanpa ada iming-iming uang dari calon kandidat.

¹¹ H. Ibrahim, Masyarakat Desa Kuro, Wawancara tanggal 23 September 2019

Berdasarkan dari wawancara yang sudah peneliti lakukan di Desa Kuro yang berhubungan dengan nilai lokal masyarakat desa kuro dalam mengantisipasi *Money Politics* ada 5 (lima) informan yang disampaikan oleh Syamsudin, Rusdi, Ipung, Oton, dan H.Ibrahim.

Dari beberapa wawancara tersebut dapat di pahami bahwasanya nilai-nilai lokal masyarakat Desa Kuro dalam mengantisipasi *Money Politics* yang *pertama* dianalisa dengan modal cultural yang merupakan serangkaian proses yang dilalui oleh suatu norma dalam masyarakat yang kemudian kemudian menjadi lembaga sosial dalam bentuk kualifikasi pendidikan yang dimana sekarang *Money Politics* sudah sangat marak dikalangan masyarakat Desa Kuro.

Dengan membentuk suatu kelompok dalam masyarakat maka *Money Politics* dapat di antisipasi dengan cara memperbaiki lagi kualifikasi pendidikan dan menanamkan kembali kedalam diri masyarakat nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur karena sangat berperan penting bagi keberlangsungan pada saat pemilihan agar tercipta pemilihan yang bebas dari kecurangan sehingga tradisi tersebut membuat masyarakat harus wajib untuk mematuhi.

Kedua Modal sosial yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dalam kehidupan bersama yang dimana *Money Politics* dapat diantisipasi dengan cara masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dengan membentuk suatu kelompok agar tercipta kebersamaan, mobilitas ide,

saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama agar dalam pemilihan tidak terjadi kecurangan.

Dengan menciptakan sikap dan perilaku berkerjasama antara masyarakat dan pemerintah maka dapat menciptakan pemilihan bersifat jujur dan transparan yang dilakukan oleh calon kandidat dan masyarakat sehingga pada pemilihan zaman marga tidak terjadi *Money Politics* dan kecurangan-kecurangan yang terjadi, tetapi semenjak adanya *Money Politics* yang sudah lumrah dikalangan masyarakat Desa Kuro sehingga menyebabkan sifat-sifat tersebut pudar.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kades Desa Kuro masyarakat Desa Kuro pada tahun 2013 berjumlah 230 KK dan tahun 2019 berjumlah 265 KK, perkiraannya pada pemilihan tahun 2013 ada 13% KK yang tidak melakukan *Money Politics* dan 87% KK yang melakukan *Money politics*. Pada tahun 2019 perkiraannya 10% KK yang tidak melakukan *Money Politics* dan 90% KK yang melakukan *Money Politics*. Artinya masyarakat Desa Kuro ini masih ada yang sangat menghargai nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur sehingga mereka tidak mau melakukan *Money Politics*.

Larangan-larangan atau hukuman jika melakukan *Money Politics* masyarakat sudah menyadari bahwa sudah diatur dalam undang-undang serta pada saat pemilihan Bawaslu dan Panwaslu pasti sudah mengawasi pada jalannya pemilihan. Pada saat masa kampanye masyarakat Desa Kuro

cukup antusias, calon kandidat melakukan kampanye dengan cara ada datang ke acara-acara syukuran, ada tim suksesnya datang dari rumah kerumah untuk memberikan sesuatu berupa uang atau barang agar orang yang diberikan itu memilih calon kandidat yang dari tim suksesnya, pada saat masa pemilihan para tim sukses itu datang untuk melihat apa orang yang dia berikan uang atau barang itu datang ke TPS untuk mencoblos.

2. Nilai Lokal Masyarakat Desa Pulau layang Dalam Mengantisipasi *Money Politics*

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Pulau layang, Menurut Sainuri 47 tahun sebagai petani, berpendapat bahwa:

“kampanye didesa ini menurut saya sih tidak ada cuma ada 2 (dua) tim sukses salah satu calon kandidat yang datang kerumah untuk memberikan sesuatu barang berupa makanan, baju, jilbab, dan uang, untuk pilih dia jadi saya sama keluarga saya membagi dua suara supaya yang memberi tetap kami penuhi janji kami, saat zaman dahulu tidak ada Money Politics masyarakat memilih dengan jujur, pada saat zaman itu calon kandidat tidak memasang gambar dikertas pencoblosan itu misalnya calon kandidat nomor 1 (satu) memasang lambang lampu tameng dan nomor 2 (dua) memasang lampu canting.”¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada saat pemilihan zaman marga tahun 1928-1978 calon kandidat tidak memasang foto dikertas pencoblosan, calon kandidat hanya menggunakan simbol misalnya nomor 1 (satu) memasang simbol lampu tameng dan nomor 2

¹² Sainuri, Masyarakat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

(dua) memasang simbol lampu canting. sangat berbeda dengan zaman sekarang dari cara pemilihannya dan soal nilai-nilai kejujurannya yang dimana zaman dahulu masyarakat memilih dengan jujur berbeda dengan zaman sekarang masyarakat memilih calon kandidat tersebut dengan diberikan uang atau barang makanan, baju, jilbab, dan uang kepada satu keluarga itu membagi dua suara supaya yang memberi merasa tetap dipenuhi janjinya.

Selanjutnya penjelasan dari salah satu tim sukses calon kandidat Lina 45 tahun, mengatakan bahwa:

“pada saat kampanye masyarakat antusias, kampanye yang dilakukan dengan datang dari rumah kerumah yang ditemani tim sukses untuk silaturahmi dan membagikan uang, jilbab, dasar, serta mengumpulkan para tim sukses disalah satu rumah warga untuk membuat tim dalam satu orang itu disuruh mencari 20 orang, untuk memilih calon kandidat yang ditunjukan, berbeda dengan saat zaman dahulu tidak ada Money politics, masyarakat memilih dengan jujur dan tulus dari hati mereka serta melihat apa visi-misi calon kandidat dan juga memilih orang terdekat atau keluarga mereka”¹³

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada pemilihan zaman sekarang masyarakat sangat antusias pada saat kampanye, kampanye yang dilakukan dengan datang dari rumah kerumah untuk membagikan uang kemasyarakat yang calon kandidat datangin. Cara calon kandidat yang datang dari rumah kerumah itu agar masyarakat menganggap bahwasanya calon kandidat tersebut memang sangat ramah kepada masyarakat dan baik hati, *Money Politics* memang benar-benar sudah sangat lumrah

¹³Lina, Masyarakat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

kalangan masyarakat ini dengan melihat para tim sukses calon kandidat itu disuruh mencari 20 orang dalam satu orang. Berbeda dengan pemilihan zaman marga masyarakat memilih dengan tulus dan jujur dari hati mereka, serta masyarakat juga melihat apa visi-misi calon kandidat tersebut, serta juga masyarakat memilih orang yang mereka kenal atau keluarga mereka.

Selanjutnya penjelasan dari H.Yana 66 tahun sebagai ibu rumah tangga yang pernah mengalami sistem pemilihan zaman marga, mengatakan bahwa:

“ada calon kandidat yang kampanye di acara nikahan dengan bernyanyi dengan masyarakat sambil memberikan uang kepada orang yang bernyanyi dan berjoget dengannya. Berbeda dengan tidak ada zaman marga dahulu orang pada saat pemilihan melakukan Money Politics, pemilihan berjalan dengan mulus dan masyarakat serta calon kandidat sangat jujur.”¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pemilihan zaman marga tahun 1928-1978 tidak ada masyarakat melakukan *Money Politics*, pemilihan zaman marga berjalan dengan lancar serta masyarakat dan calon kandidatnya sangat jujur, berbeda dengan zaman sekarang ada calon kandidat yang berkampanye diacara pernikahan dengan cara bernyanyi dan berjoget sambil membagi-bagikan uang kepada orang-orang yang berjoged dan bernyanyi dengan calon kandidat tersebut, cara itu dilakukan oleh calon kandidat untuk menarik perhatian masyarakat agar dirinya berkesan muda didekati oleh masyarakat.

¹⁴H. Yana, Masyarakat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

Selanjutnya penjelasan dari Lontok 71 tahun sebagai tokoh adat, mengatakan bahwa:

“saat waktu kampanye kami para tim sukses dikumpulkan oleh calon kandidat untuk memberikan suatu arahan dan penjelasan untuk mengajak masyarakat, serta calon kandidat tersebut memberikan uang dan juga calon kandidat itu menjanjikan jika ia menang akan memberikan kambing dan bebek untuk membuat perternakan didesa ini serta juga menjanjikan untuk memberikan mesin dan bantuan-bantuan lainnya jika ia terpilih, tentu sangat berbeda dengan zaman dahulu yang dimana calon kandidat tidak pernah berjanji tapi langsung memberikan bukti serta calon kandidat juga sangat transparan kepada masyarakat.”¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada pemilihan zaman maga calon kandidat sangat bersifat transparan kepada masyarakat serta calon kandidatnya tidak pernah berjanji kepada masyarakat, tetapi langsung memberikan bukti. Berbeda dengan zaman sekarang para tim sukses salah satu calon kandidat tersebut dikumpulkan untuk untuk diberikan arahan dan penjelasan tentang kampanye dan juga memberikan uang, serta calon kandidat tersebut menjanjikan kepada masyarakat jika dia terpilih dia kan banyak memberikan bantuan kepada Desa Pulau layang. cara kampanye ini digunakan agar menarik perhatian masyarakat untuk memilih dia karena calon kandidat sudah banyak memberikan bantuan.

Selanjutnya penjelasan dari Ayu Puji Astuti 38 tahun sebagai sekdes, menyatakan bahwa:

¹⁵Lontok, Masyarakat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

“masyarakat sangat antusias dengan adanya pilkada, calon kandidat melakukan kampanye dengan cara datang ke acara resepsi, syukuran, silaturahmi dari rumah kerumah, dan acara yasinan pada saat kampanye calon kandidat tersebut memberikan sesuatu berupa sembako, baju, jilbab, mukena, pemilihan zaman dahulu tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang tapi zaman dahulu tidak ada yang namanya money politics masyarakat dan calon kandidat sangat jujur dan jika melakukan kecurangan-kecurangan masyarakat juga takut dosa, serta takut kepada nilai-nilai nenek moyang zaman dahulu.”¹⁶

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemilihan zaman marga tahun 1928-1978 tidak ada *Money Politics* masyarakat dan calon kandidat sangat jujur serta jika melakukan hal-hal yang berupa kecurangan-kecurangan masyarakat dan calon kandidat tersebut juga takut dosa, serta juga takut kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang zaman dahulu sampai dengan tahun 2012.

Berbeda dengan zaman sekarang ada banyak metode yang dilakukan calon kandidat untuk berkampanye dengan datang ke acara-acara yang ada di masyarakat dan juga datang dari rumah kerumah, tentu saja pada saat kampanye calon kandidat tidak membawa tangan kosong, pasti membawa sebuah bingkisan yang untuk diberikan kepada masyarakat yang berupa sembako, baju, jilbab, mukena.

Pasti ada maksud dan tujuan dari calon kandidat tersebut meberikan sesuatu tersebut misal contohnya memberikan mukena dan jilbab agar masyarakat memandang bahwasanya calon kandidat tersebut

¹⁶Ayu Puji Astuti, Masyarakat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

sangat islami dan baik sehingga masyarakat dapat berpikir tidak mungkin calon kandidat tersebut mengkhianati atau berbohong kepada mereka.

Berdasarkan dari wawancara yang sudah dilakukan dengan masyarakat Desa Pulau layang yang berhubungan dengan nilai lokal masyarakat Desa Pulau layang dalam mengantisipasi *Money Politics* ada 5 (lima) informan yang disampaikan oleh Sainuri, Lina, H,Yana, Lontok, Ayu Puji Astuti.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai-nilai lokal masyarakat Desa Pulau layang dalam Mengantisipasi *Money Politics* dianalisa dengan, *pertama* Modal cultural yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan, *Money Politics* yang sudah sangat marak di Desa Pulau layang ini dapat diatasi dengan membentuk suatu lembaga komunitas maka akan terbangun dengan adanya ikatan sosial diantara individu dengan individu lainnya, serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa melakukan *Money politics* itu sangat berbahaya. Sehingga nilai lokal masyarakat dapat dilestarikan kembali dan diaplikasikan kedalam proses atau kaidah perencanaan dan pembangunan budaya agar dapat mengantisipasi *Money Politics*.

Kedua Modal sosial yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dalam kehidupan masyarakat yang dimana *Money politics* dapat diatasi dengan cara kerjasama sehingga sikap dan perilaku berkerjasama dapat di

internalisasikan pada setiap individu sehingga bersifat jujur, transparan, sistem kekerabatan, agama, takut sumpah nenek moyang.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Sekdes Desa Pulau Layang pada tahun 2013 masyarakat Desa Pulau Layang berjumlah 350 KK dan tahun 2019 berjumlah 384 KK. Pada pemilihan tahun 2013 15% masyarakat yang tidak melakukan *Money Politics*, dan 85% masyarakat yang sudah melakukan *Money Politics*. Pada pemilihan tahun 2019 100% masyarakat menerima pemberian dari calon kandidat, barang yang diberikan itu tidak hanya uang ada juga berupa baju, jilbab, kain dan sebagainya.

Masyarakat melakukan *Money Politics* karena di Desa Pulau Layang ini tingkat pendidikannya masih sangat minim, serta juga keadaan ekonominya, karena menurut Bourdieu modal ekonomi sangat penting sehingga modal cultural dan modal sosial di nomor 2 (dua) kan ketika berhadapan dengan *Money Politics*. Jadi pada tahun 2013 masih ada masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai leluhur. Tetapi pada tahun 2019 nilai-nilai tersebut sudah pudar semua.

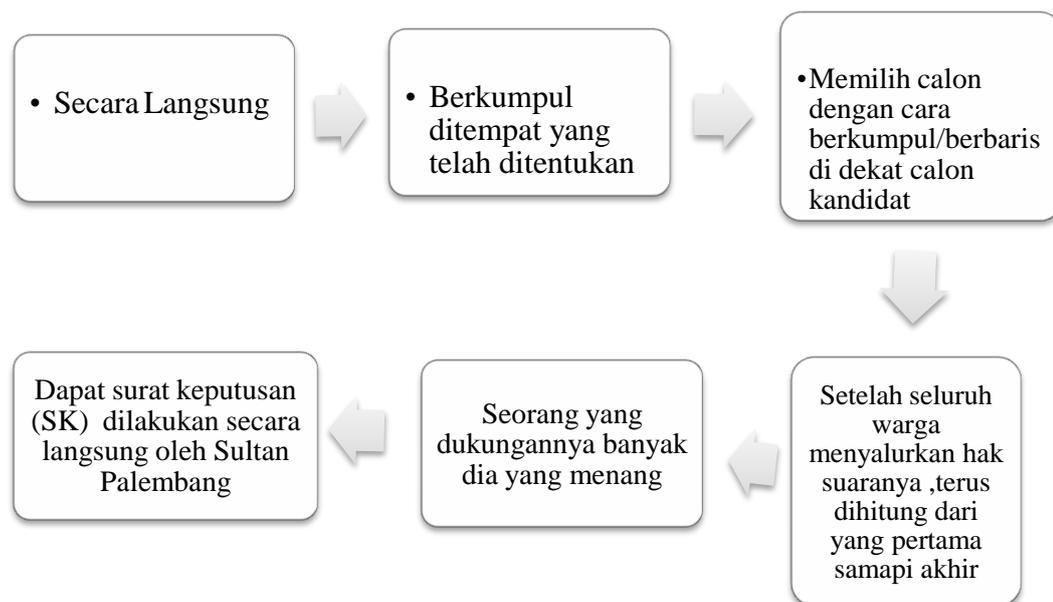
Sifat-sifat tersebut perlahan-lahan memudar semenjak masuknya *Money Politics* pada Pilkada Tahun 2013, *Money Politics* sekarang sudah sangat marak dikalangan masyarakat Desa Pulau layang dan untuk nilai-nilai lokal dan larangan-larangan atau hukuman jika melakukan *Money*

Politics masyarakat sudah mempercayai aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang, Bawaslu dan Panwaslu.

Ada bermacam-macam cara kampanye yang dilakukan oleh calon kandidat untuk menarik perhatian masyarakat supaya masyarakat memilih dia dan bermacam-macam janji juga yang disampaikan calon kandidat supaya masyarakat memilih dia. Adapun 2 (dua) sistem pemilihan pada saat zaman marga atau persirah dulu dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan 3.1

Struktur Sistem Pemilihan Zaman Persirah atau Marga Secara Berkumpul pada tahun 1928-1978



Sumber: Wawancara Rosak, tanggal 24 September 2019

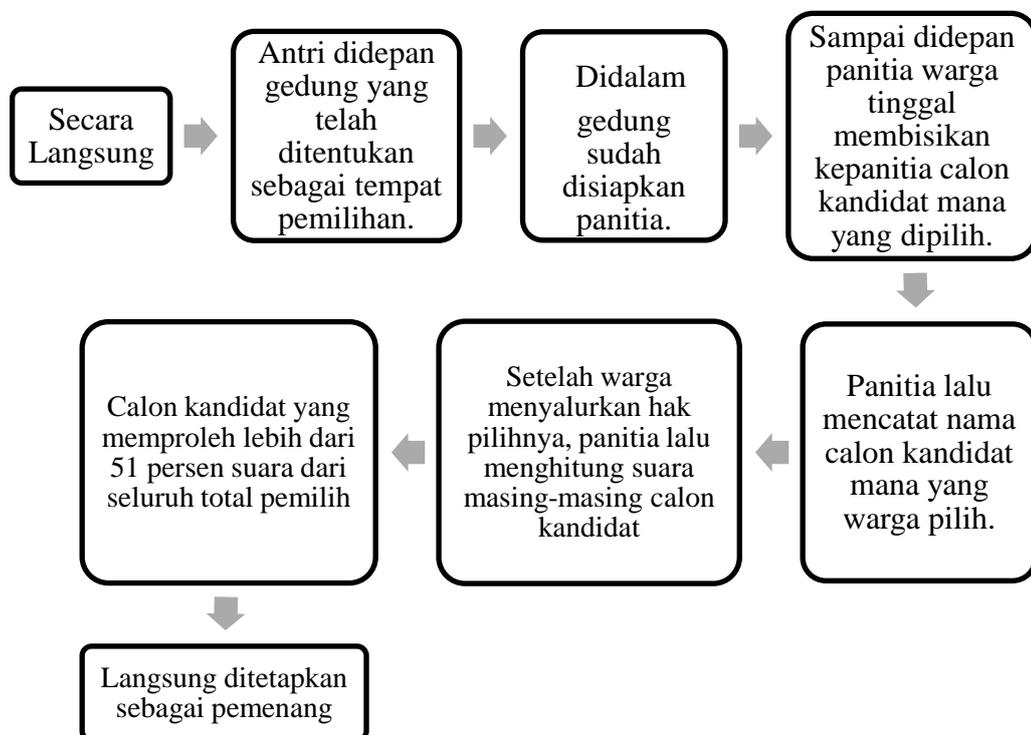
Berdasarkan penjelasan diatas, sistem pemilihan zaman persirah atau marga secara berkumpul itu dipilih secara langsung, pemilihan secara

langsung sudah ada sejak pada zaman marga jadi bukan suatu hal baru lagi bagi masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang. Tanpa menggunakan uang seorang calon kandidat dapat memenangkan pemilihan karena sistem pemilihan secara berkumpul ini masyarakat dapat melihat secara langsung siapa calon kandidat tersebut dan dapat melihat kegigihan dan sifat calon kandidat tersebut, serta calon kandidat dapat melihat siapa saja yang memilih dia apakah keluarga dan kenalannya memilih dia, karena pada zaman dahulu siapa yang mempunyai banyak keluarga dan kenalan dia yang akan memenangkan pemilihan tersebut.

Bagan 3.2

Struktur Sistem Pemilihan Zaman Persirah atau Marga Secara Berbisik

Pada tahun 1928-1978



Sumber: Wawancara Rosak tanggal 24 September 2019

Berdasarkan penjelasan diatas sistem pemilihan pada zaman persirah atau marga dahulu bahwa pemilihan zaman marga sangat unik dan berbeda dengan zaman sekarang. Sistem pemilihan secara berbisik tersebut tidak bertahan lama, setelah itu sistem pemilihan dilakukan seperti sekarang dengan mencoblos surat suara terus memasukan surat suara kedalam kotak. Pemilihan zaman dahulu bersih dari pelanggaran dan kecurangan yang dimana pada zaman itu tidak mengenal yang namanya *Money Politics* atau membeli suara rakyat. Calon kandidat dapat memenagkan sebuah pemilihan dikarenakan calon kandidat tersebut gigih, transparan, dan banyak orang yang dikenalnaya serta keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Kuro Dan Desa Pulau layang yang berdasarkan 10 (sepuluh) informan, 5 (lima) informan dari masyarakat Desa Kuro dan 5 (lima) informan dari masyarakat Desa Pulau layang. Dari keseluruhan pernyataan di atas bahwasanya nilai-nilai lokal masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang sangat menghargai tradisi yang diajarkan oleh leluhur yaitu Belulus dan juga berpedoman pada motto Kabupaten Ogan Komering Ilir Bende Seguguk (gong satu kesatuan) berikut artinya:

- a. Belulus adalah tradisi yang dimana masyarakat menyiapkan sesajen yang berisikan ketupat yang berbentuk hewan dan membakar kemenyan selama proses dilaksanakan membacakan ayat suci al-qur'an, dengan tujuan untuk agar jika masyarakat ingin mencalonkan dirinya agar diberi kelancaran dan diberi

kemudahan sehingga berhasil memenangkan pemilihan tersebut.¹⁷ Dari tradisi inilah masyarakat dan calon kandidat pada saat pemilihan tidak pernah melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan karena mereka sangat menghargai dan takut jika melakukan sebuah kecurangan.

- b. Bende Seguguk (gong satu kesatuan) adalah menggambarkan kehidupan masyarakat dan kepemimpinan daerah dengan semangat persatuan dan kesatuan didalam mewujudkan keseimbangan antara kemakmuran kedamaian, kebahagiaan, dan keadilan masyarakat.¹⁸ Pada saat pemilihan pada tahun 1928-1978 sampai 2012 masyarakat dan calon kandidat juga sangat berpegang teguh pada motto Bende Seguguk sehingga tidak pernah terjadi kecurangan dalam pemilihan.

Dari kedua nilai lokal Bebulus dan Bende Seguguk inilah sehingga pada pemilihan dari tahun 1928-1978 samapi 2012 tidak pernah terjadi kecurangan sehingga membuat masyarakat sangat mengantisipasi *Money Politics*. Tetapi semenjak adanya budaya *Money Politics* masuk pada tahun 2013 sehingga melunturkan kedua nilai lokal tersebut. Nilai tersebut bermakna satu kesatuan sehingga masyarakat harus memegang tradisi dan beberapa sifat yang harus mereka pegang.

¹⁷ Rosak, Tokoh Adat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 22 November 2019

¹⁸ <https://www.kaboki.go.id>, Diakses tanggal 23 November 2019

Berupa Jujur, karena pemilihan zaman marga masyarakat dan calon kandidat sangat bersifat jujur sehingga pemilihan zaman dahulu tidak pernah terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan apalagi *Money Politics*. Transparan, karena pemilihan zaman marga calon kandidat sangat transparan terhadap data dirinya, dan kekayaannya serta visi-misinya.

Sistem kekerabatan, karena masyarakat dapat melihat dan memilih calon kandidat berdasarkan yang mereka kenal dan keluarga. Takut sumpah nenek moyang, karena masyarakat zaman dahulu sangat takut terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang zaman dahulu. Agama, karena masyarakat dan calon kandidat sangat takut dosa jika melakukan hal-hal yang berupa kecurangan-kecurangan.

Dari 5 (lima) sifat yang tertanam dalam diri masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang dalam mengantisipasi *Money Politics* sekarang sudah pudar semua semenjak *Money Politics* masuk pada pilkada 2013. Untuk larangan-larangan atau hukuman jika masyarakat melakukan *Money Politics*. Masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang sudah menyadari bahwa sudah diatur dalam Undang-Undang serta pada saat pemilihan Bawaslu dan Panwaslu sudah mengawasi jalannya pemilihan apakah terjadi kecurangan atau tidak.

Money Politics sekarang sangat marak dan lumrah di kehidupan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) termasuklah di Desa

Kuro dan Desa Pulau layang Kecamatan Pampangan ada bermacam-macam bentuk *Money Politic* yang dilakukan masyarakat sebagai berikut:¹⁹

a. Berbentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memegang di akui sebagai senjata politik yang sangat strategis untuk menaklukan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana uang.

b. Berbentuk Barang dan Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar persona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun barang dan fasilitas dan sarana umum juga sebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politisi” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon

¹⁹ Amarru Mufie Holish. et al. (2018). Money Politics dalam Praktik Demokrasi Indonesia. *Jurnal Unnes*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, h. 235

yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya.

Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan barang berupa, sembako, baju, jilbab, mukena, kain dasar. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan jariah politisi yaitu dengan pembangunan masjid, membangun jalan, memberi bantuan kepada petani. Sedangkan yang termasuk dari bentuk *Money Politics* adalah berupa uang dengan nominal tertentu.

Pada saat masa kampanye di Desa Kuro dan Desa Pulau layang masyarakat sangat antusias menyabutnya dengan bermacam-macam gaya kampanye yang dilakukan calon kandidat untuk menarik perhatian masyarakat berupa datang keacara-acara syukuran, resepsi, yasinan, dan datang dari rumah kerumah untuk menyampaikan visi dan misinya dan bersilahturahmi.

B. Mengaktualisasikan Nilai Lokal Masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang Untuk Antisipasi *Money Politics*

Mengaktualisasikan adalah menerapkan atau menghidupkan kembali nilai yang sudah pudar kedalam diri masyarakat. Dalam hal ini dapat diterapkan dengan proses interpretasi, sosialisasi, enkulturalisasi. Dalam penelitian ini peneliti meneliti bagaimana mengaktualisasikan nilai lokal dalam kehidupan masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang untuk antisipasi *Money Politics* yang dimana

sekarang *Money Politics* sudah marak atau sangat lumrah dikalangan masyarakat. Inilah hasil wawancara untuk menjawab persoalan rumusan masalah nomor 2 (dua).

1. Mengaktualisasikan Nilai Lokal Masyarakat Desa Kuro Untuk Antisipasi *Money Politics*

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Desa kuro, Menurut H. Ibrahim 60 tahun, berpendapat Bahwa:

“mengaktualisasikan kembali nilai-nilai lokal tersebut dapat dilihat iya dari tahun ketahun pasti setiap cara berkampanye berubah-ubah sehingga masyarakat menghalalkan segala cara untuk menang dalam pemilihan dan pudarnya nilai-nilai zaman dahulu ini kerana kurang pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang buruknya jika adanya money politics.”²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya melakukan *Money Politics* dan melakukan kecurangan-kecurangan pasti dapat mengaktualisasikan kembali nilai-nilai lokal untuk antisipasi *Money Politics* dalam kehidupan masyarakat sekarang dan masyarakat akan menyadari bahayanya melakukan *Money Politics*.

Selanjutnya penjelasan dari anggota tokoh adat Desa Kuro, Menurut Rosak 65 tahun, berpendapat bahwa:

“mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dengan menanamkan kembali kepada masyarakat nilai-nilai zaman dahulu dan

²⁰ H. Ibrahim, Tokoh Adat Desa Kuro, Wawancara tanggal 23 September 2019

meningkatkan ekonomi masyarakat serta mengubah kebiasaan masyarakat di desa ini."²¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, karena dengan lemahnya ekonomi masyarakat memang akan sering memaksa masyarakat untuk menghalalkan berbagai cara baik itu melanggar hukum dan ini menjadikan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, kalau masyarakat sejahtera ini bisa menjadi faktor untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai lokal masyarakat untuk mengantisipasi *Money Politics*.

Berdasarkan dari wawancara yang sudah dilakukan dengan tokoh adat Desa Kuro yang berhubungan dengan mengaktualisasikan nilai lokal Desa Kuro untuk antisipasi *Money Politics* ada 2 (dua) informan yang disampaikan oleh H.Ibrahim, Rosak.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mengaktualisasikan nilai lokal masyarakat Desa kuro untuk antisipasi *Money Politics* dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat Desa Kuro akan bahayanya *Money Politics*, serta mensejahterakan masyarakat yang miskin, karena sebaaian masyarakat melakukan *Money Politics* karena faktor ekonomi dengan lemahnya ekonomi masyarakat akan melakukan berbagai cara meskipun hal itu melanggar hukum.

²¹ Rosak, Tokoh Adat Desa Kuro , Wawancara tanggal 23 September 2019.

Pada zaman dahulu di Desa Kuro saat pemilihan tidak ada yang namanya *Money Politics*, nilai lokal masyarakat sangat kental dengan memilih calon kandidat dari hati mereka dan tulus tanpa ada iming-iming uang dari calon kandidat dan tim sukses, masyarakat juga melihat apa visi misi calon kandidat jika visi misinya bagus atau baik untuk Desa Kuro maka masyarakat akan tertarik memilih calon kandidat tersebut.

2. Mengaktualisasikan Nilai Lokal Masyarakat Desa Pulau layang Untuk Antisipasi *Money Politics*

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Desa Pulau layang, H. Rahmat 68 tahun, berpendapat bahwa:

“mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dengan mengubah kebiasaan masyarakat dalam pemilu, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa melakukan money politics itu berdosa.”²²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan mengubah kebiasaan buruk masyarakat dalam pemilihan itu dihilangkan oleh dalam diri masyarakat tersebut maka itu akan mengurangi adanya *Money Politics* dan meningkatkan pendidikan politik agar pengetahuan masyarakat lebih paham tentang politik dan bahayanya jika melakukan

²² H. Rahmat, Tokoh Adat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

Money Politics serta dapat mengaktualisasikan kembali nilai-nilai lokal untuk antisipasi *Money Politics* dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya pernyataan dari tokoh adat Desa Pulau layang, menurut Andi 70 tahun, berpendapat bahwa:

“mengaktualisasikan kembali nilai-nilai tersebut dengan mengajarkan kepada masyarakat bahwa melakukan money politics itu dosa dan mengajarkan kembali nilai-nilai dari nenek moyang zaman dahulu serta mengubah kebiasaan masyarakat yang menjadi golput kerana tidak ada yang kasih uang pada saat pemilihan.”²³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat nilai-nilai nenek moyang zaman dahulu, serta mengubah kebiasaan tersebut diubah menjadi tidak biasa dengan menanamkan pengetahuan dan memberikan sosialisasi kemasyarakat bahwa jika melakukan hal-hal yang berupa kecurangan tersebut sangat bahaya dan bisa dihukum serta dapat mengaktualisasikan kembali nilai-nilai lokal untuk antisipasi *Money Politics* ke masyarakat.

Selanjutnya pernyataan dari tokoh adat Desa Pulau layang, menurut Butun 55 tahun, berpendapat bahwa:

“mengaktualisasikan kembali nilai-nilai zaman dahulu dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan calon kandidat bahwa melakukan kecurangan itu dosa dan menanamkan kembali nilai-nilai zaman dahulu dengan cara mensosialisakannya kepada masyarakat.”²⁴

²³ Andi, Tokoh Adat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

²⁴ Butun, Tokoh Adat Desa Pulau layang, Wawancara tanggal 24 September 2019

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat nilai-nilai zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang yang dimana zaman dahulu masyarakat sangat takut jika melakukan hal-hal yang berbau kecurangan dan masyarakat pun belum mengenal adanya *Money Politics*, serta menanamkan kembali nilai-nilai zaman dahulu kepada masyarakat bahwa jika melakukan hal-hal yang tidak berbau kecurangan itu akan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Pulau layang yang berhubungan mengaktualisasikan nilai lokal masyarakat Desa Pulau layang untuk antsiapsi *Money Politics* ada 3 (tiga) informan yang disampaikan oleh H. Rahmat, Andi, Butun.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mengaktualisasikan nilai lokal masyarakat Desa Pulau layang untuk antisipasi *Money Politics*. Dengan meningkatkan pendidikan politik serta memeberikan sosialisasi yang berbau bahayanya melakukan *Money Politics*, dan menghilangkan kebiasaan buruk masyarakat dengan menanamkan pengetahuan masyarakat pentingnya untuk mengantisipasi *Money Politics*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat Desa Kuro dan Desa Pulau layang yang berdasarkan 5 (lima) informan, 2 (dua) informan dari tokoh adat Desa Kuro dan 3 (tiga) informan dari tokoh adat Desa Pulau layang. Dari keseluruhan pertanyaan diatas dapat di pahami

bahwa dengan maraknya *Money Politics* yang berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini, maka hal-hal buruk yang mencederai nilai-nilai dan etika dalam perpolitikan yang dimana dahulunya nilai-nilai tersebut sangat kental dikehidupan masyarakat, maka dari itu nilai-nilai tersebut dapat ditanam kembali ke diri masyarakat dengan melakukan proses sebagai berikut:

a. Internalisasi

Internalisasi adalah proses pembelajaran panjang yang dilakukan sejak seorang individu dilahirkan sampai dengan meninggal.²⁵ Dengan cara menanamkan kembali kepada masyarakat nilai-nilai yang sudah diajarkan dari leluhur yaitu tradisi belulus yang sekarang sudah mulai luntur semenjak masuknya budaya *Money Politics*, sehingga dapat diaktualisasikan kembali nilai-nilai yang sudah pudar dengan proses diinternalisasikan.

Serta juga menurut teori modal sosial dari Bourdieu bahwa potensi modal sosial yang terbentuk dan terdapat di masyarakat dapat dibiasakan atau diinternalisasikan pada individu, kelompok kecil, maupun kelompok masyarakat yang lebih luas agar dapat tujuannya tercapai bersama sehingga nilai-nilai yang sudah luntur dapat diaktualisasikan kembali ke dalam diri masyarakat.

²⁵ Dosensosiologi.com, diakses tanggal 23 November 2019

b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari generasi satu ke generasi lain dalam sebuah kelompok masyarakat.²⁶ Dengan cara sebagai berikut:

- Pendidikan Politik

Pendidikan politik harus lebih ditingkatkan lagi dan dikembangkan lagi dengan cara meningkatkan pendidikan yang ada dilembaga-lembaga politik seperti politik, organisasi masyarakat, masyarakat, bahkan instansi pendidikan seperti sekolah diharapkan mampu mengembalikan pola pendidikan yang baik untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya melakukan *Money Politics*, dan mengubah budaya yang negatif dalam kehidupan masyarakat.

- Memperbaiki Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan yang terjadi saat ini adalah sistem yang lebih mementingkan akademis, tanpa menghiraukan segi non akademis dan etika, ini merupakan ketidakberhasilan sistem, maka dari itu

²⁶ *Ibid*

perlu pembaharuan disistem politik, sistem politik yang baik harus mengedepankan Agama dan etika, salah satu faktor dari praktif-praktik negatif yang terjadi salah satunya adalah *Money Politics*, dikarenakan pengetahuan agama dan etika yang terkait dengan diri sendiri dan sudah ditanamkan dalam-dalam, maka hal-hal yang berdampak negatif tidak terjadi dalam praktik politik.

- Sosialisasi Politik

Pendidikan dan sosialisasi politik adalah dua cara yang diharapkan dapat mampu menjadi senjata dalam mengantisipasi praktik budaya *Money Politics*, karena sosialisasi lebih terkonsentrasi pada penyuluhan tentang sistem, budaya dan hal yang berkaitan dengan politik, maka diharapkan sosialisasi politik dapat menjadi magnet untuk menggerakkan budaya *Money Politics* yang sangat meresahkan, dan sistem politik semakin membaik.

c. Enkulturasasi

Enkulturasasi adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran

serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, tata sosial, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan masyarakat.²⁷

Enkulturasasi dimulai dari adanya kegiatan dengan meniru berbagai tindakan, contohnya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga dan juga membentuk sikap dan perilaku kerja sama pada individu atau kelompok masyarakat. Kemudian dari tindakan tersebut diinternalisasikan atau dimasukkan dalam kepribadinya dengan proses yang dilakukan berkali-kali maka akan memunculkan kemampuan dalam dirinya sehingga dapat mengaktualisasikan kembali nilai lokal yang sudah pudar melalui proses enkulturasasi.

Dari ketiga proses tersebut dapat diterapkan ke masyarakat dan menanamkan kembali kedalam diri masyarakat supaya kebiasaan negatif dalam politik sudah hilang, serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai lokal masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang yang dimana nilai-nilai dan budaya-budaya lokal untuk antisipasi *Money Politics* yang berupa tradisi belulus dan berpegang teguh pada motto Bende Seguguk sehingga dari tradisi ini menghasilkan sifat jujur, transparan, sistem kekerabatan, takut sumpah nenek moyang dan agama, dapat diaktualisasikan kembali di kehidupan masyarakat, tetapi

²⁷ *Ibid*

dengan masuknya budaya *Money Politics* sehingga melunturkan nilai-nilai lokal masyarakat untuk antisipasi *Money Politics*.

Sebagai tinjauan dalam penelitian bahwa teori modal sosial yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu adalah kumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terhubung untuk memiliki jaringan yang tahan lama lebih atau kurang hubungan kelembagaan dari kenalan dan pengakuan timbal balik atau dengan kata lain, untuk keanggotaan dalam suatu kelompok yang menyediakan masing-masing anggotanya dengan dukungan dari modal yang dimiliki kolektivitas, “kredensial” yang memberikan hak kepada mereka untuk dipuji, dalam berbagai arti kata.²⁸

Jadi dari hasil penelitian setelah dikonfirmasi dengan teori modal sosial Pierre Bourdieu nilai-nilai atau budaya lokal masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau layang sudah luntur karena adanya budaya *Money Politics*, nilai-nilai lokal yang sangat potensial tersebut dapat di aktualisasikan kembali jika menanamkan pengetahuan kepada masyarakat bahwa melakukan *Money Politics* tersebut sangat bahaya, dengan melakukan internalisasi, sosialisasi, enkulturalisasi.

²⁸ Julia Hauberer. (2010). *Social Capital Theory*, Prague: Dissertation Charles University, h.38

Serta dikonfirmasi dengan modal cultural yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan bahwa dengan cara memperbaiki lagi suatu lembaga yang mengatur jalannya pemilu harus lebih diperhatikan lagi dengan memberikan suatu sosialisasi kepada masyarakat bahwa nilai-nilai yang diwariskan leluhur kepada kita itu sangat berharga sehingga dari kebudayaan tersebut dapat menciptakan pemilihan yang damai bebas dari kecurangan.